MISMATCH BACKGROUND PENDIDIKAN GURU PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH SMP NEGERI 24 MEDAN

Adelina M. Aritonang[1], Abdinur Batubara[2], Arief Wahyudi[3], Fazli Rachman[4], Oksari Anastasya Sihaloho[5]
Pendididkan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan
[1]adelina31aritonang@gmail.com, [2]abdinurbatubara@unimed.ac.id,
[3]ariefwahyudi@unimed.ac.id, [4]fazli.rachman@unimed.ac.id,
[5]oksari.sihaloho@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate the phenomenon of educational background mismatch among Pancasila Education teachers and its implications on the quality of learning at SMP Negeri 24 Medan. This issue is critical as it contradicts Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which mandates educational linearity. The research employed a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation involving the vice-principal, subject teachers, and students. The results indicated that all Pancasila Education teachers at the school had non-linear (mismatch) backgrounds, originating from History Education, Law, and English Education degrees. This mismatch implies a decline in learning quality across three aspects. In planning, teachers experience administrative dependency, relying on lesson plans passed down by previous teachers. In implementation, limited content knowledge causes teaching to become rigid, textual, and conventional, creating difficulties in simplifying philosophical, ideological, and juridical concepts, although senior teachers build resilience through interactive media. In evaluation, a systemic bias was found in academic supervision; teachers from distant disciplines choose to only showcase teaching performance in their original major (English), leaving actual classroom obstacles unevaluated. Theoretically, the impact is categorized into two typologies: close-discipline mismatch (Law/History) which maintains overlapping cognitive concepts, and distant-discipline mismatch (English) which comprehensively decreases self-efficacy, teaching voice volume, and classroom interaction.

Keywords: Mismatch Background, Pancasila Education, Quality Of Learning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena *mismatch background* pendidikan guru Pendidikan Pancasila dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran di SMP Negeri 24 Medan. Fenomena ini penting karena bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan linieritas keahlian. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara,

dan dokumentasi terhadap wakil kepala sekolah, guru pengampu, serta siswa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh guru pengampu Pendidikan Pancasila berlatar belakang non-linier (mismatch), berasal dari Pendidikan Sejarah, Ilmu Hukum, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada penurunan mutu pembelajaran dalam tiga aspek. Pada aspek perencanaan, guru mengalami ketidakmandirian administrasi sehingga cenderung bergantung pada dokumen peninggalan guru terdahulu. Pada aspek pelaksanaan, keterbatasan content knowledge membuat pengajaran menjadi kaku, tekstual, konvensional, serta kesulitan menyederhanakan konsep filsafat, ideologi, dan yuridis, meski guru senior mampu membangun resiliensi lewat media interaktif. Pada aspek evaluasi, ditemukan bias sistemik pada supervisi akademik; guru mismatch rumpun jauh memilih hanya menampilkan performa mengajar pada jurusan aslinya (Bahasa Inggris) sehingga hambatan riil di kelas tidak terevaluasi sekolah. Secara teoretis, dampak mismatch terbagi dua: rumpun dekat (Hukum/Sejarah) yang masih memiliki irisan konsep kognitif, dan rumpun jauh (Bahasa Inggris) yang berdampak menyeluruh pada penurunan efikasi diri, volume suara, serta kurangnya interaksi aktif di kelas.

Kata Kunci: *Mismatch Background*, Pendidikan Pancasila, Mutu Pembelajaran

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing secara global. Sistem pendidikan di Indonesia menerapkan berbagai kurikulum demi mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta berjiwa nasionalis. Dalam mencapai tujuan tersebut, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peran krusial untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan (Batubara et al., 2024). Dalam ekosistem ini, guru berperan sebagai kunci utama dalam proses pembelajaran sekaligus pembentuk karakter, sehingga kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme mereka. Profesi guru menuntut penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Fahruddin, 2022). Guru yang memiliki kompetensi yang memadai akan mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan bermakna dan keberhasilan seorang guru dalam mengajar tercermin dari minat belajar

dan respon siswanya (siagian et al., 2024). Di dalamnya terdapat rencana pembelajaran yang mengarahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik agar mereka memiliki kesiapan pribadi dan kemampuan sesuai kebutuhan masyarakat (Jamaludin et al., 2023). Guru yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan bermakna untuk menumbuhkan minat belajar serta respons positif dari siswanya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya fenomena mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan standar akademik, teori Lee Shulman tentang Pedagogical Content Knowledge (PCK) juga menekankan pentingnya integrasi antara penguasaan materi dan pedagogi sesuai bidang studi (Taylor & Francis Group.,2025). Penugasan mengajar di luar bidang keahlian ini sering kali dipicu oleh keterbatasan jumlah dan distribusi guru yang tidak merata, sehingga kepala sekolah mengambil kebijakan taktis menugaskan guru mengajar di luar bidangnya agar proses pembelajaran tetap berjalan.

Fenomena mismatch ini menjadi sangat krusial pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila karena kompetensi profesional guru di bidang ini berperan dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Rachman et al., 2021). Dalam konteks ini, kompetensi pedagogik dan profesional menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembelajaran (Kabatiah et al., 2024). Kendati demikian, mismatch background pendidikan tetap menjadi permasalahan penting karena guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai sering menghadapi kesulitan dalam menguasai materi, memilih strategi pembelajaran, serta merancang evaluasi yang tepat (Masbirorotni, 2025). Tanpa penguasaan yang memadai, pembelajaran cenderung bersifat hafalan, konvensional, kurang kontekstual, dan minim penguatan nilai karakter (Mardiana, 2022). Tenaga pendidik Pendidikan

Pancasila diharapkan tidak hanya berfokus pada metode konvensional (lesson learning), melainkan harus mampu menghadirkan inovasi media pembelajaran berbasis teknologi internet guna mengoptimalkan edukasi dan ruang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda (Batubara et al., 2023).

Secara empiris, penelitian Lubis & Siregar (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat guru SMP di Medan yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya akibat keterbatasan distribusi guru dan kebijakan sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Sutrisno & Yuliana (2023) yang menyatakan bahwa mismatch guru berimplikasi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila, di mana guru non-linier mengalami kesulitan menjelaskan materi secara mendalam sehingga pembelajaran menjadi monoton. Kondisi faktual ini teridentifikasi secara nyata di SMP Negeri 24 Medan, di mana seluruh guru Pendidikan Pancasila memiliki latar belakang pendidikan di luar bidangnya (Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Hukum). Ketidaksesuaian ini berdampak pada administrasi RPP yang belum relevan serta munculnya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah dampak ketidaksesuaian background tersebut terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Pancasila dari aspek perencanaan, proses, dan hasil belajar di SMP Negeri 24 Medan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk membedah secara mendalam fenomena out of field teaching atau mismatch background pendidikan guru pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Studi ini dilaksanakan secara purposif di SMP Negeri 24 Medan dengan melibatkan 7 orang informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, meliputi 1 orang Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, 3 orang guru pengampu Pendidikan Pancasila berlatar belakang non-linier (lulusan Ilmu Hukum, Sejarah/Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris), serta 3 orang peserta didik kelas VII dan VIII. Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi kelas, serta

data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kualifikasi akademik, perangkat administrasi (Modul Ajar/RPP), dan arsip hasil belajar siswa. Dalam prosesnya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara dan lembar observasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data atau display data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

C.Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. *Mismatch Background* Pendidikan Guru pada Pelajaran Pendidikan Pancasila

Fenomena *mismatch background* di SMP Negeri 24 Medan terlihat nyata pada penempatan tiga guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang ijazah S-1 nya tidak linear, yaitu Pendidikan D3 Sejarah dan S-1 Bahasa Indonesia, Ilmu Hukum, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Ketidaksesuaian latar belakang ini menghambat penguasaan konsep dasar (content knowledge) yang bersifat abstrak, filosofis, dan yuridis; seperti guru background bahasa Indonesia yang kesulitan mengajarkan Filsafat dan Ideologi, serta guru background ilmu hukum yang terkendala membedakan irisan nilai Sila ke-2 dan Sila ke-5. Dampaknya, siswa mengeluhkan ketidakmampuan guru dalam menyederhanakan bahasa teoretis buku paket yang rumit.

Dari aspek pedagogik, terdapat kesenjangan di mana pembelajaran masih didominasi metode konvensional (ceramah, mencatat, dan menjawab soal), serta volume suara guru yang background nya dari bahasa Inggris suaranya yang pelan memicu respons pasif siswa yang cenderung diam. Ketidaksesuaian ini juga memicu tekanan awal berupa krisis rasa percaya diri karena guru merasa mengajar pendidikan Pancasila bukan pada porsinya, meskipun guru dengan masa kerja lama menunjukkan komitmen belajar mandiri yang tinggi. Sebagai strategi adaptasi, para guru memanfaatkan kompetensi sosial melalui forum MGMP wilayah dan pembentukan jaringan dukungan sejawat informal di sekolah, seperti guru background pendidikan bahasa Inggris yang rutin berkonsultasi mengenai materi sulit

kepada guru background ilmu hukum pada jam istirahat atau waktu senggang.

Temuan hasil penelitian di atas dapat dibedah menggunakan payung teoretis dari Ingersoll (1998) mengenai *out of field teaching*, yang mendefinisikan kondisi institusional di mana guru mendapatkan penugasan struktural untuk mengajar mata pelajaran yang sama sekali tidak selaras dengan latar belakang bidang studi atau ijazah asli mereka. Jika dianalisis menggunakan *Fit Theory* oleh Kristof-Brown et al. (2005), khususnya pada indikator *demands abilities fit,* tidak terpenuhinya keselarasan antara tuntutan materi kurikulum Pendidikan Pancasila dengan kemampuan murni guru terbukti menjadi pemicu utama munculnya tekanan awal berupa penurunan *self efficacy* (keyakinan diri) pada guru.

Dampak ini dipertegas oleh teori *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dari Shulman (1987), yang menyatakan bahwa guru yang efektif wajib mengintegrasikan penguasaan materi murni *(content knowledge)* dan strategi penyampaiannya *(pedagogical knowledge)*. Ketika fondasi content knowledge guru rapuh, kemampuan PCK mereka runtuh; guru gagal menyederhanakan materi yang abstrak, filosofis, dan yuridis, sehingga pembelajaran bertransformasi menjadi kaku, dangkal, dan sangat tekstual. Penurunan mutu ini melahirkan dua tipologi rumpun keilmuan: Mismatch rumpun dekat (Hukum/Sejarah) yang memiliki basis materi kuat namun melakukan reduksi kurikulum dengan mendangkalkan konsep filsafat ideologi, serta *mismatch* rumpun jauh (Bahasa Inggris) yang kehilangan total peta kognitif keilmuan Pancasila sehingga berdampak pada runtuhnya rasa percaya diri, suara mengajar yang pelan, dan kecenderungan langsung memberikan tugas tertulis tanpa penjelasan teoretis.

Dampak sistemik dari runtuhnya PCK ini pada akhirnya bermuara pada disorientasi pedagogis di ruang kelas, di mana proses transfer nilai-nilai kewarganegaraan mengalami stagnasi. Ketika guru mismatch rumpun jauh mengompensasi keterbatasan *content knowledge* mereka dengan langsung memberikan tugas tertulis tanpa penjelasan, siswa kehilangan jembatan kognitif untuk memahami esensi materi. Akibatnya, kelas tidak

hanya berjalan monoton, tetapi juga memicu penurunan motivasi belajar dan akumulasi nilai tugas siswa yang rendah. Kegagalan mengeksekusi metode interaktif ini mempertegas fakta bahwa pengajaran konvensional yang kaku secara konsisten gagal merangsang keterlibatan aktif peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi profesionalisme guru dan pemanfaatan media pembelajaran inovatif berbasis teknologi menjadi urgensi yang mutlak demi memulihkan kembali efektivitas, kemandirian, dan pemahaman kontekstual siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

2. Implikasi Mismatch Background Pendidikan Guru Terhadap Mutu Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan membawa implikasi serius terhadap seluruh rangkaian mutu pembelajaran. Pada tahap perencanaan, proses transisi ke kurikulum merdeka menghambat kemandirian guru, di mana mereka terpaksa bersandar pada dokumen modul ajar dari guru pension dan modul ditahun lalu, bahkan guru background pendidikan bahasa Inggris secara terbuka mengaku belum mampu menyusun modul ajar Pendidikan Pancasila sendiri. Pada tahap pelaksanaan, terjadi pemutusan hubungan di mana guru gagal mengeksekusi metode interaktif (seperti video YouTube dan kuis yang direncanakan guru background ilmu hukum) karena tidak menguasai materi secara mendalam, sehingga kelas kembali berjalan monoton dan menurunkan minat belajar siswa. Kondisi kelas yang pasif ini menegaskan bahwa model pengajaran yang cenderung konvensional dan penggunaan media yang monoton secara konsisten akan terus menurunkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, metode pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa guna mengatasi kejenuhan serta meningkatkan kembali pemahaman dan motivasi belajar siswa dalam pelajaran PPKn (Batubara & Tobing, 2025).

Pada tahap evaluasi, pelaksanaan ujian remedial cenderung digunakan sebagai instrumen administratif untuk memastikan nilai siswa dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah. Selain itu, proses penjaminan mutu melalui supervisi akademik belum

sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan; sebagai contoh, guru background pendidikan bahasa Inggris memilih untuk menampilkan performa mengajar pada mata pelajaran aslinya yang linear, yaitu Bahasa Inggris, saat disupervisi oleh Kepala Sekolah. Meskipun langkah ini dapat mengamankan penilaian kinerja guru secara administratif, hal tersebut menyebabkan kendala dan hambatan instruksional yang terjadi di kelas Pendidikan Pancasila tidak terdata dalam instrumen evaluasi formal sekolah. Akibatnya, manajemen sekolah kehilangan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan guru mismatch secara akurat, sehingga program pendampingan atau pelatihan yang tepat sasaran belum dapat dirancang struktural demi meningkatkan kualitas pembelajaran Pancasila di kelas.

Implikasi nyata terhadap penurunan mutu pembelajaran di SMP Negeri 24 Medan ini sangat sejalan dengan studi empiris terdahulu oleh Sutrisno & Yuliana (2023), yang menegaskan bahwa *mismatch background* akademik guru berimplikasi langsung pada penurunan efektivitas instruksional di dalam kelas dan menjadi batu sandungan besar dalam mengimplementasikan kurikulum baru secara ideal. Kegagalan guru dalam mengeksekusi rencana pembelajaran interaktif membuktikan bahwa dokumen administrasi yang baik tidak berarti apa-apa tanpa adanya penguasaan materi yang mendalam. Hambatan manajerial ini juga didukung oleh penelitian dari Nasution & Siregar (2022) yang menemukan bahwa guru non-linear mengalami kendala manajerial dan administratif yang berat, terutama dalam hal kemandirian merancang perangkat pembelajaran mandiri yang kontekstual (seperti modul ajar), yang memaksa mereka melakukan replikasi buta terhadap dokumen peninggalan masa lalu.

Terakhir, fenomena manipulasi agenda supervisi dan pengamanan nilai ketuntasan melalui remedial administratif di sekolah ini diperkuat oleh temuan Masbirorotni (2025). Teori tersebut menyatakan bahwa *out of field teaching* sering kali menciptakan bias dan distorsi dalam sistem evaluasi akademik internal; formalitas administrasi sengaja dipenuhi oleh guru untuk menutupi kelemahan kompetensi mereka di hadapan Kepala Sekolah, yang

berakibat pada terkuburnya hambatan instruksional nyata di tingkat kelas tanpa pernah mendapatkan intervensi atau penyelesaian struktural dari pihak manajemen sekolah. Seluruh indikator ini menegaskan bahwa fenomena *mismatch* berkontribusi signifikan terhadap penurunan mutu pembelajaran Pendidikan Pancasila secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Fenomena mismatch guru pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 24 Medan merupakan kebijakan darurat yang tidak dapat dihindari demi mengisi kekosongan jam mengajar akibat adanya guru yang pensiun. Praktik ini melibatkan tiga orang guru aktif dengan kualifikasi akademik tidak linear yang secara sosiologis terbagi menjadi dua tipologi, yakni mismatch rumpun dekat (Sarjana Hukum, Sejarah, dan Bahasa Indonesia) serta mismatch rumpun jauh (Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris). Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan ini berdampak signifikan terhadap penurunan kompetensi profesional guru, terutama dalam penguasaan materi murni yang bersifat filosofis, abstrak, dan yuridis seperti Ideologi Negara dan tata peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut memicu krisis rasa percaya diri yang lebih mendalam pada guru rumpun jauh dibandingkan rumpun dekat, meskipun faktor masa kerja yang panjang terbukti mampu membangun resiliensi pribadi di mana guru senior dapat memanfaatkan modal sosial melalui forum MGMP dan diskusi sejawat untuk meminimalisir keterbatasan kompetensi mereka.

Pada praktiknya, imbas negatif mismatch ini secara nyata mengonstruksi pelemahan mutu pembelajaran di sekolah pada seluruh tahapan instruksional. Dalam tahap perencanaan, terjadi ketidakmandirian administratif yang parah di mana guru dengan mismatch rumpun jauh tidak mampu menyusun modul ajar kurikulum merdeka secara mandiri, sehingga memicu fenomena ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kebutuhan nyata siswa di kelas. Pada tahap pelaksanaan, transfer ilmu cenderung berjalan kaku, tekstual atau berorientasi pada buku teks, dan didominasi metode ceramah atau pencatatan yang membuat siswa pasif, meskipun beberapa guru senior

berusaha menyiasatinya dengan media interaktif seperti video YouTube dan kuis. Lebih jauh lagi, evaluasi pembelajaran terjebak dalam formalitas penilaian di mana nilai siswa direkayasa agar tuntas melalui remedial, yang diperparah oleh adanya celah pengawasan di mana guru mismatch bermata pelajaran ganda hanya menampilkan kinerja mengajar terbaik pada bidang aslinya untuk mengamankan nilai kinerja, sehingga manajemen sekolah mengalami kebutaan informasi terhadap hambatan nyata yang terjadi di kelas Pendidikan Pancasila.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, direkomendasikan kepada manajemen SMP Negeri 24 Medan untuk memprioritaskan linearitas kualifikasi akademik dalam pembagian tugas mengajar, menghindari penunjukan guru dari rumpun yang terlalu jauh seperti bahasa asing untuk mengampu mata pelajaran berbasis nilai, serta mengoptimalkan sistem supervisi akademik secara objektif dan berkala pada seluruh mata pelajaran yang diampu guna memutus mata rantai manipulasi administrasi. Sementara itu, bagi guru yang mengalami *mismatch*, diharapkan dapat secara aktif meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogiknya melalui diklat, workshop kurikulum merdeka, dan peningkatan literasi mandiri terkait aspek filosofis serta yuridis Pancasila, sekaligus mulai membangun kemandirian dalam menyusun perangkat pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan karakteristik peserta didik di kelas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (dalam Kusumastuti, A., & Ahmad, M.). (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Howay, A. (2020). Pemenuhan Mutu Standar Proses. CPMP Papua.

Kaelan. (2012). Metodologi penelitian kualitatif bidang filsafat. Yogyakarta: Paradigma.

Morissan. (2019). Metode penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: Kencana.

Nurdin, S., & Adriantoni. (2019). Profesi keguruan. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surokim, Julijanti, Y. R., C. S. M., & Camelia, T. H. R. S. A. F. R. A.

(2016). Riset komunikasi: Strategi praktis bagi peneliti pemula. Pusat Kajian Komunikasi Publik.

Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., et al. (2021). Rambu-rambu menulis ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (proposal dan skripsi). Publishing Format.

Wau, Y. (2023). Profesi kependidikan. Medan: Unimed Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Yunita, S., Jamaludin, & Feriyansyah. (2022). Inovasi Pembelajaran PKn Menyongsong Profil Calon Guru Masa Depan. CV. Format Publishing.

Jurnal

Aiyub, A., et al. (2023). Implementasi pembelajaran Pendidikan pancasila berbasis nilai dalam membentuk karakter siswa. Jurnal Pendidikan Indonesia.

Apdika, M., et al. (2025). Pengaruh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru terhadap mutu pembelajaran di sekolah. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, 8(1), 45–56.

Arifin, M. (2020). Profesionalisme dalam dunia kerja: Sebuah tinjauan teoritis. Jurnal Humaniora, 12(1), 55–63.

Batubara, A., Kabatiah, M., & Rachman, F. (2023). Inovasi Aplikasi MEMPAN (Membumikan Pancasila) Berbasis Website Sebagai Ruang Edukasi dan Aktualisasi Pancasila. 7(1), 785–795.

Batubara, A., & Tobing, D. L. (2025). Pemanfaatan Google Lens sebagai media pembelajaran PPKN yang efektif: Studi kualitatif pada siswa SMP Negeri 35 Medan tahun ajaran 2024/2025. Khatulistiwa: *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora,* 5(3), 905-916.

Batubara, A., Nababan, R., & Rachman, F. (2024). Development of a website-based Pancasila student profile detection application using the forward chaining method as an alternative to civic education learning assessment. Proceedings of ICIESC.

Dharma, S. (2021). Membangun kesadaran global warga negara: Studi kebijakan publik di era pandemi Covid-19. Jurnal Perspektif, 10(1), 248–254.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21, 33–54.

Fahriana, A. S. (2025). Analisis kompetensi profesional guru dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Pendidikan pancasila. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 15(1), 112–125

Fahruddin, Z. (2022). Dampak guru berlatar belakang pendidikan berbeda dalam keberhasilan belajar siswa. Tarqiyatuna, 1(1), 17–23.

Jamaludin, Siallagan, A. P., Sitohang, A. T., Hutapea, D. J., Marpaung, R., Tobing, S. R. M., & Simbolon, T. G. L. (2023). Problematika Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum Merdeka Di

SMAN 7 Medan. *Jurnal Profesi Keguruan,* 9(2), 195-207.

Kabatiah, M., Batubara, A., & Rachman, F. (2024). Pedagogical Competence of Civic Education Teacher in 21st Century: A Systematic Literature Review. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals' fit at work. *Personnel Psychology*, 58(2), 281–342.

Lubis, R., & Siregar, M. (2020). Kualifikasi akademik guru dan kaitannya dengan prestasi belajar siswa SMP di Medan. *Jurnal Pendidikan Karakter,* 10(3), 305–318.

Mardiana, S. (2022). Kebijakan peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi tuntutan pembelajaran abad 21. *Jurnal Civics*, 19(2), 210–223.

Masbirorotni, G. S. (2025). Pentingnya linearitas latar belakang pendidikan guru. *Jurnal Niara*.

Nasution, D., & Siregar, H. (2022). Distribusi guru dan mismatch background. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia,* 9(3), 201–210.

Rachman, F., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum Indonesia. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan,* 3(5), 3000-3008.

Sagala, Syaiful. (2013). Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar. Bandung: Alfabeta.

Saian, G. D. A. (2023). Pengaruh latar belakang pendidikan guru terhadap selfefficacy. Attractive: Innovative Education Journal, 5(1), 237–243.

Siagian, L. (2022). The influence of teachers personality competency on students moral attitude. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(4), 727–734.

Siagian, L., & Sinaga, S. R. L. (2024). Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PPKn Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 37 Medan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14(1).

Sutrisno, E., & Yuliana, H. (2023). Pengaruh mismatch background guru terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 4(1), 44–58.

Taylor & Francis Group. (2025). Interdisciplinary learning and pedagogical content knowledge in sustainability education – implications for STEAM education. International Journal of Geographical and Environmental Education, advance online publication.

W. Edwards Deming. (1986). Out of the crisis. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.